

**TRANSFORMASI *E-GOVERNMENT* MELALUI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**FARHAN FASHA SYUHADA
NIM. 07011282126061**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**TRANSFORMASI E-GOVERNMENT MELALUI
SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
(SIPD) DI BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**

Oleh:

**FARHAN FASHA SYUHADA
NIM.07011282126061**

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2025

Pembimbing

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM
NIP. 195811191985031003



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M Nur Budiyanto, S. Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**TRANSFORMASI E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DI BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA
SELATAN**

Skripsi

Oleh :

**FARHAN FASHA SYUHADA
07011282126061**

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 20 Mei 2025**

Pembimbing :

1. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS., MM
195811191985031003 (NIP)

Tanda Tangan



Penguji :

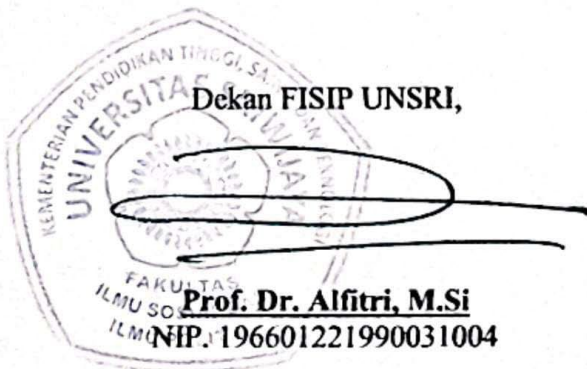
1. Drs. Mardianto., M.Si
196211251989121001
2. Riza Adelia Suryani, S.Sos., M.Si
198902222023212044

Tanda Tangan



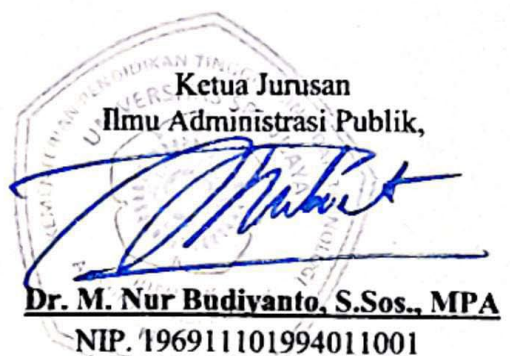
Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



**Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004**

**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,**



**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farhan Fasha Syuhada

NIM : 07011282126061

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **"Transformasi E-Government Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan"** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan

Indragaya, 1 Mei 2025



Farhan Fasha Syuhada

NIM. 07011282126061

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kaulah Tokoh Utama Dalam Hidupmu Sendiri”

“Sudah Suatu Kewajaran Kalau Kau Berpikir Tidak Bisa Melakukannya Sendirian.

Tapi Sangat Menyakitkan Kalau Orang Lain Mengatakan Kalau Kau Tidak Bisa

Melakukannya”

“Bermimpi Bukanlah Hal Yang Buruk, Tapi Jangan Sampai Lupa Keadaanmu Yang

Sesungguhnya”

PERSEMBAHAN

Terima Kasih Kepada Allah SWT Atas Berkat Dan Rahmat-Nya, Skripsi Ini Saya

Persembahkan Untuk Ayah, Bunda, Adik, Serta Keluarga Tercinta.

ABSTRAK

Transformasi *e-government* menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan daerah di era digital. Salah satu instrumen utama dalam mendukung transformasi ini adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Namun, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital aparatur sipil negara, serta resistensi terhadap perubahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah membawa dampak positif terhadap integrasi data perencanaan, pelaporan, dan evaluasi, meskipun masih terdapat hambatan berupa keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Faktor pendorong keberhasilan meliputi komitmen pimpinan, pelatihan ASN, dan dukungan regulasi, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah ketidakmerataan infrastruktur dan kurangnya kompetensi digital ASN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transformasi *e-government* melalui SIPD di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan sudah menunjukkan perkembangan positif, namun diperlukan upaya penguatan kapasitas ASN serta peningkatan infrastruktur teknologi untuk optimalisasi sistem di masa mendatang.

Kata Kunci: Transformasi Digital, *E-Government*, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pembimbing



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM
NIP.195811191985031003

Indralaya, 1 Mei 2025
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

ABSTRACT

The transformation of electronic government has become an urgent necessity in efforts to enhance efficiency, transparency, and accountability in regional governance in the digital era. One of the key instruments supporting this transformation is the Regional Government Information System (SIPD), as regulated in Presidential Regulation Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). However, the implementation of the Regional Government Information System at the Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra Province still faces various challenges, such as limited technological infrastructure, low digital literacy among civil servants, and resistance to change. This research employed a descriptive qualitative method with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The research informants were civil servants working within the Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra Province. the results of the study indicate that the implementation of the Regional Government Information System has had a positive impact on the integration of planning, reporting, and evaluation data, although there are still obstacles such as technological limitations and human resource capacity gaps. The supporting factors for successful transformation include leadership commitment, digital competency training for civil servants, and regulatory support, while the main inhibiting factors are the uneven distribution of infrastructure and the lack of digital skills among civil servants. In conclusion, the transformation of electronic government through the Regional Government Information System at the Regional Human Resources Development Agency of South Sumatra Province has shown positive developments. However, further efforts are needed to strengthen human resource capacity and improve technological infrastructure to optimize the system in the future.

Keywords: Digital Transformation, Electronic Government, Regional Government Information System.

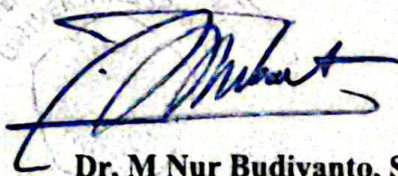
Advisor



Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM
NIP.195811191985031003

Indralaya, 1 Mei 2025

Head Of Public Administration Department
Faculty Of Social And Political Science Sriwijaya University



Dr. M Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Transformasi *E-Government* Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan." Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayah tercinta, Zul Ispahlawani, dan ibu tercinta, Erwi Neswati, atas kasih sayang, dukungan moral maupun materi, serta doa yang tiada henti. Penulis juga memohon maaf atas segala kesalahan, baik dalam perkataan maupun perbuatan, yang mungkin kurang berkenan selama ini.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM, selaku pembimbing utama, atas bimbingan, saran, serta motivasi yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan rezeki dan kesehatan. Penulis menyadari bahwa pencapaian ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan mendoakan agar segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa.

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus.

4. Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arah dan dukungan kepada penulis.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyo, S. Sos., MPA. selaku ketua jurusan program studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si. selaku sekretaris ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Dr. Katriza Imania, M.Si. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang telah memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan karya ini. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Indralaya, Mei 2025

Farhan Fasha Syuhada

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori	15
2.1.1 Konsep Transformasi E-government.....	15
2.1.2 Tujuan Dan Manfaat E-Government	22
2.1.3 Model-Model E-Government	24
2.1.4 Elemen Yang Mempengaruhi E-Government	26
2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Transformasi E-government	28
2.1.6 Aspek-Aspek Penerapan Transformasi E-Government.....	32
2.1.7 Teori Yang Digunakan	34
2.2 Penelitian Terdahulu	37
2.3 Kerangka Berpikir	44
BAB III.....	46
METODE PENELITIAN	46

3.1 Jenis Penelitian	46
3.2 Lokasi Penelitian	47
3.3 Definisi Konsep	47
3.4 Fokus Penelitian.....	48
3.5 Jenis Dan Sumber Data.....	49
3.6 Informan Penelitian	50
3.7 Teknik Pengumpulan Data	51
3.8 Teknik Analisis Data	52
3.9 Teknik Keabsahan Data.....	54
BAB IV	56
HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	56
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	59
4.3 Hasil Penelitian	60
4.4 Pembahasan/Diskusi	122
BAB V.....	149
PENUTUP.....	149
5.1 Kesimpulan	149
5.2 Saran.....	154
DAFTAR PUSTAKA	157
LAMPIRAN.....	160
A. Lampiran Surat Keputusan Skripsi.....	160
B. Lampiran Kartu Bimbingan Usulan Skripsi	162
C. Lampiran Kartu Bimbingan Skripsi	163
D. Lembar Perbaikan Seminar Proposal.....	164
E. Lembar Perbaikan Ujian Komprehensif	166
F. Lampiran Pedoman Wawancara	168
G. Izin Penelitian	172
H. Surat Balasan Instansi.....	173
I. Hasil Cek Turnitin	174
J. Dokumentasi Wawancara	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur	4
Tabel 2 Negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan <i>e-government</i> di Asia Tahun 2024	6
Tabel 3 Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4 Fokus Penelitian.....	48
Tabel 5 Informan Penelitian.....	59
Tabel 6 Matriks Hasil Penelitian.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kecepatan Wi-Fi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Gambar 2 Kerangka Berpikir	45
Gambar 3 Komponen Analisis Data	52
Gambar 4 Peta Lokasi Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	56
Gambar 5 Struktur Organisasi.....	59
Gambar 6 Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.....	87
Gambar 7 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	88
Gambar 8 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	95
Gambar 9 Sistem Pengadaan Secara Elektronik	95
Gambar 10 Layanan Pengadaan Secara Elektronik	96
Gambar 11 Publikasi File Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	97
Gambar 12 Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat	102
Gambar 13 Sistem Informasi Administrasi Pengaduan Online (SIAPO)	103
Gambar 14 Publikasi File Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	107
Gambar 15 Pengecekan Speed Wifi Tanggal 21 Maret 2025 Di Pagi Hari.....	111
Gambar 16 Infrastruktur Penunjang Transformasi <i>E-Government</i> (WIFI).....	112
Gambar 17 Fasilitas Komputer Yang Baik	112
Gambar 18 Rapat Koordinasi.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan *e-government* didukung oleh kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan ini diperkuat melalui Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang terintegrasi dan efisien (Isnaeni & Nurcahyanto, 2024). Salah satu komponen utama SPBE adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang bertujuan untuk mengintegrasikan data pembangunan di tingkat daerah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pembangunan dengan pendekatan berbasis data (Karundeng et al., 2021; Sari & Syafina, 2022).

Menurut Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dirancang untuk mengatasi masalah klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah, seperti duplikasi data, kurangnya transparansi, dan ketidakefisienan dalam proses perencanaan anggaran. Di Provinsi Sumatera Selatan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menjadi salah satu institusi yang berperan dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), khususnya dalam pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, masih ada kendala untuk implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

1. Kurangnya Pemahaman ASN: Banyak ASN yang belum sepenuhnya memahami cara kerja Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sehingga membutuhkan pelatihan tambahan.
2. Infrastruktur Teknologi yang Terbatas: Beberapa daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi kendala jaringan internet yang tidak stabil.
3. Resistensi terhadap Perubahan: Sebagian pegawai menunjukkan resistensi terhadap sistem baru, yang dianggap lebih kompleks dibandingkan metode konvensional.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) bertujuan untuk mengintegrasikan data pemerintahan daerah ke dalam satu sistem yang komprehensif. Dengan sistem ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui analisis data yang lebih akurat dan transparan (Karundeng et al., 2021). Di sisi lain, transformasi *e-government* tidak hanya membutuhkan perangkat teknologi yang memadai, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

Oleh karena itu, peran institusi pengembangan SDM seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat penting dalam memastikan keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan kompetensi ASN, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi *e-government* melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Namun, hingga saat ini, kajian terkait efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam konteks pengembangan SDM di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih

terbatas. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai hambatan dan peluang dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Salah satu penerapan utama transformasi digital di sektor publik adalah *e-government*, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK). *E-government* menawarkan berbagai manfaat, seperti efisiensi operasional, peningkatan transparansi, dan pengurangan biaya administrasi. *E-government* memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung proses administrasi, meningkatkan aksesibilitas data, dan memperbaiki interaksi antara pemerintah dengan masyarakat (Irma et al., 2023). Berbagai negara telah mengadopsi *e-government* sebagai strategi utama untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Fakta ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keberhasilan *e-government* sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, keterampilan SDM, serta dukungan regulasi yang memadai. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Nugroho & Purbokusumo (2020) menyebutkan bahwa tingkat pembangunan TIK lebih dari 50% masih berada dalam kondisi rendah dan sangat rendah. Salah satu tantangan terbesar yang dialami para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan adalah faktor usia, terutama bagi mereka yang sudah uzur. Seiring bertambahnya usia, kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi cenderung mengalami hambatan.

Para ASN yang sudah lanjut usia sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengoperasikan sistem berbasis teknologi, seperti Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah (SIPD) dan berbagai aplikasi *e-government* lainnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan pemahaman terhadap konsep digital, kebiasaan menggunakan metode kerja konvensional, serta penurunan daya ingat dan kecepatan belajar. Selain itu, ketidakterbiasaan dalam menggunakan perangkat digital, seperti komputer dan aplikasi berbasis daring, juga menjadi kendala utama. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dapat terganggu. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat, seperti pelatihan yang berkelanjutan, bimbingan dari rekan kerja yang lebih muda, serta pengembangan sistem yang lebih ramah pengguna agar para ASN yang lebih tua dapat beradaptasi dengan perubahan teknologi informasi secara lebih baik. Adapun kesiapan *e-government* suatu negara tergantung pada faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya ekonomi, manusia, teknologi, kesediaan atau minat pemerintah dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, kecukupan infrastruktur dan penyediaan layanan, aksesibilitas konten, kegunaan dan keakuratan informasi digital dan e-service, bahasa, kepercayaan dan kerahasiaan.

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Pegawai	Persentase (%)
21-30 tahun	1	2%
31-40 tahun	5	6%
41-50 tahun	29	36%
51-60 tahun	40	50%
>60 tahun	6	6%
Jumlah	81	100,00

*Sumber: Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026*

Tabel di atas menunjukkan komposisi pegawai di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan kelompok umur. Dari total 81 pegawai, mayoritas berada dalam

rentang usia 51-60 tahun, yaitu sebanyak 40 orang atau 50% dari total pegawai. Sementara itu, kelompok usia di atas 60 tahun berjumlah 6 orang atau sekitar 6%. Data ini mendukung pernyataan sebelumnya bahwa salah satu tantangan utama dalam penggunaan teknologi informasi di lingkungan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah faktor usia. Dengan lebih dari separuh pegawai berusia di atas 50 tahun, kemungkinan besar terjadi kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem digital seperti SIPD dan aplikasi *e-government* lainnya. Kelompok usia yang lebih muda, seperti pegawai berusia 21-30 tahun dan 31-40 tahun, memiliki jumlah yang jauh lebih sedikit, masing-masing hanya 1 orang (2%) dan 5 orang (6%). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang lebih terbiasa dengan teknologi masih sangat terbatas, sehingga diperlukan upaya tambahan dalam memberikan pelatihan serta bimbingan bagi pegawai yang lebih tua agar mereka dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Gambar 1 Kecepatan Wi-Fi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Dokumentasi Pribadi

Berdasarkan hasil uji kecepatan internet yang ditampilkan pada gambar, terlihat bahwa kecepatan unduhan (download) sebesar 29.96 Mbps dan kecepatan unggahan (upload) mencapai 46.93 Mbps. Meskipun kecepatan unggahan tergolong cukup

tinggi, kecepatan unduhan yang lebih rendah dapat menjadi kendala bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dalam mengakses berbagai layanan digital, seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan platform *e-government* lainnya. Selain itu, faktor latensi (ping) yang rendah memang menunjukkan koneksi yang stabil, tetapi ketidakseimbangan antara kecepatan unduhan dan unggahan dapat menyebabkan hambatan dalam pengolahan data yang membutuhkan akses cepat dan responsif. Masalah ini semakin diperparah dengan kemampuan ASN yang sudah uzur dalam beradaptasi dengan teknologi informasi.

Dengan kecepatan internet yang tidak selalu optimal, ASN yang kurang terbiasa dengan sistem digital akan mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan aplikasi berbasis daring. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi kerja, keterlambatan dalam pelaporan, serta hambatan dalam implementasi transformasi *e-government* di lingkungan BPSDMD. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur jaringan dan pelatihan teknis bagi ASN sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas sistem administrasi berbasis digital.

Tabel 2 Negara-negara yang memiliki tingkat perkembangan *e-government* di Asia Tahun 2024

Country	Rating class	EGDI rank	Subregion	OSI	HCI	TII	EGDI (2024)	EGDI (2022)
Singapore	VH	3	South-eastern Asia	0.9831	0.9362	0.9881	0.9691	0.9133
Republic of Korea	VH	4	Eastern Asia	1.0000	0.9120	0.9917	0.9679	0.9529
Saudi Arabia	VH	6	Western Asia	0.9899	0.9067	0.9841	0.9602	0.8539
United Arab Emirates	VH	11	Western Asia	0.9163	0.9436	1.0000	0.9533	0.9010
Japan	VH	13	Eastern Asia	0.9427	0.9117	0.9509	0.9351	0.9002
Bahrain	VH	18	Western Asia	0.9030	0.8680	0.9877	0.9196	0.7707
Israel	V3	23	Western Asia	0.8541	0.8739	0.9763	0.9014	0.8885
Kazakhstan	V3	24	Central Asia	0.9390	0.8403	0.9235	0.9009	0.8628
Türkiye	V3	27	Western Asia	0.9225	0.9192	0.8322	0.8913	0.7983
China	V3	35	Eastern Asia	0.9258	0.7902	0.8995	0.8718	0.8119
Cyprus	V2	38	Western Asia	0.8217	0.8698	0.8941	0.8619	0.8660
Oman	V2	41	Western Asia	0.8077	0.7977	0.9674	0.8576	0.7834
Mongolia*	V2	46	Eastern Asia	0.8222	0.7775	0.9374	0.8457	0.7209
Armenia*	V2	48	Western Asia	0.7922	0.8561	0.8782	0.8422	0.7364
Thailand	V2	52	South-eastern Asia	0.7611	0.8032	0.9410	0.8351	0.7660
Qatar*	V2	53	Western Asia	0.7655	0.7114	0.9963	0.8244	0.7149
Malaysia	V1	57	South-eastern Asia	0.7280	0.7192	0.9862	0.8111	0.7740
Uzbekistan*	V1	63	Central Asia	0.7648	0.7580	0.8769	0.7999	0.7265
Indonesia*	V1	64	South-eastern Asia	0.8035	0.7293	0.8645	0.7991	0.7160

Sumber: United Nations Department of Economic and Social Affairs (E-government Survey 2024

Berdasarkan laporan *United Nations E-government Survey 2024*, Indonesia berada pada peringkat 64 dari 193 negara dalam indeks *e-government* kalah dengan Singapura yang berada di peringkat 3 dalam indeks *e-government*, hal ini menunjukkan adanya kemajuan tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Nurlaila et al., (2024), yang menyebutkan bahwa keberhasilan *e-government* di Indonesia sering kali terhambat oleh rendahnya literasi teknologi di kalangan pegawai pemerintahan. Libert et al., (2016) menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh aspek manusia, budaya organisasi, dan manajemen perubahan. Dalam konteks Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), tiga faktor utama yang perlu diperhatikan adalah:

1. Kesiapan Organisasi: Kesiapan organisasi, termasuk pelatihan SDM dan dukungan pimpinan, memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan transformasi.
2. Infrastruktur Teknologi: Infrastruktur yang memadai, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet, menjadi dasar keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Kolaborasi Antarlembaga: Kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan institusi pengembangan SDM diperlukan untuk memastikan integrasi data dan program yang efektif.

Para ahli sepakat bahwa transformasi *e-government* tidak dapat berhasil tanpa dukungan manajemen perubahan yang efektif. Heeks (2006) dalam teorinya tentang *e-government failure*, menjelaskan bahwa kegagalan *e-government* sering kali disebabkan oleh kesenjangan antara desain teknologi dan realitas implementasi di

lapangan. Berdasarkan analisis awal, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Sumatera Selatan meliputi:

1. Pengembangan Modul Pelatihan Digital: Membuat modul pelatihan berbasis e-learning agar ASN dapat belajar secara fleksibel.
2. Penguatan Infrastruktur: Mengalokasikan anggaran tambahan untuk memperbaiki infrastruktur internet di daerah-daerah yang tertinggal.

Scholl (2010) mendefinisikan transformasi sebagai proses perubahan mendalam yang terjadi dalam organisasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Transformasi *e-government* melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah di era digital. Namun, keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sangat bergantung pada kesiapan SDM, infrastruktur teknologi, dan manajemen perubahan. Penelitian ini berfokus pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan salah satu instansi kunci dalam pengembangan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN). Melalui kajian mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk memperkuat peran ASN dalam mendukung keberhasilan sistem tersebut di tingkat daerah.

Urgensi penelitian ini didorong oleh beberapa faktor utama yang terkait dengan peran Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam mendukung tata kelola

pemerintahan yang modern, terintegrasi, dan berbasis data. Pertama, kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin mendesak di tengah tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap kinerja pemerintah. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menawarkan solusi teknologi yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola data secara lebih efektif, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. Namun, keberhasilan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) tidak hanya bergantung pada teknologi yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya ASN, yang akan mengoperasikan dan memanfaatkan sistem tersebut.

Kedua, transformasi digital atau *e-government* telah menjadi agenda global yang diadopsi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan inisiatif telah mendorong percepatan transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu instrumen penting yang diharapkan dapat mendorong percepatan tersebut. Namun, tanpa adanya kajian yang mendalam mengenai kesiapan dan kapabilitas pemerintah daerah, termasuk dalam hal pengembangan kompetensi ASN, implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berisiko mengalami hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya.

Ketiga, fokus penelitian ini pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat relevan mengingat peran strategis lembaga ini dalam pengembangan kapasitas ASN di wilayah tersebut. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ASN memiliki kompetensi yang memadai

untuk mendukung keberhasilan program-program pemerintah, termasuk dalam hal penguasaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis yang tidak hanya bermanfaat bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, tetapi juga dapat diadaptasi oleh instansi pemerintah lainnya yang sedang atau akan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam hal pengelolaan informasi dan data yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Salah satu keunggulan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah kemampuannya untuk mengintegrasikan berbagai fungsi pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan, dalam satu platform digital yang komprehensif. Dengan adanya integrasi ini, pemerintah daerah dapat mengurangi risiko kesalahan dan inefisiensi yang sering kali terjadi akibat pengelolaan data yang terpisah-pisah atau tidak sinkron (Nasution, 2021). Lebih lanjut, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Data yang dikelola melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, sehingga meningkatkan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) juga dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, karena data yang diperlukan dapat diakses dan dianalisis secara real-time oleh para pengambil kebijakan.

Namun, untuk dapat memaksimalkan potensi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang memadai dan infrastruktur sarana prasarana. Di sinilah peran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan menjadi sangat penting, karena lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ASN di daerah memiliki kemampuan yang sesuai dengan tuntutan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam merumuskan strategi pengembangan infrastruktur dan kompetensi ASN yang lebih efektif, terutama dalam mendukung implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Dengan mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, penelitian ini akan memberikan rekomendasi praktis yang relevan untuk meningkatkan kompetensi ASN sekaligus memperkuat sistem *e-government* di tingkat daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya dalam mengadopsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan mengembangkan kapasitas ASN, sehingga transformasi digital di Indonesia dapat berjalan dengan lebih cepat dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa rumusan masalah yang dapat diambil adalah:

1. Sejauh manakah transformasi *e-government* melalui website Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi,

dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)?

2. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan bagaimana solusi untuk mengatasi resistensi perubahan serta keterbatasan infrastruktur yang ada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka ditariklah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh manakah transformasi *e-government* melalui website Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan faktor penghambat oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan mengetahui solusi apa saja untuk mengatasi resistensi perubahan serta keterbatasan infrastruktur yang ada.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini ialah:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori transformasi digital dan *e-government* dalam sektor publik, khususnya dalam pengelolaan pemerintahan daerah.
2. Memperkaya literatur tentang implementasi dan evaluasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam konteks transparansi dan akuntabilitas.
3. Menyumbang pemahaman teoritis tentang faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan adopsi teknologi informasi di organisasi pemerintahan.
4. Menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai efektivitas sistem informasi pemerintahan dalam mendukung reformasi birokrasi di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi Mahasiswa

1. Memberikan contoh nyata penerapan teori transformasi digital dalam penelitian administrasi publik, khususnya e-government.
2. Menyediakan data dan analisis sebagai referensi untuk penelitian atau tugas akademik yang berkaitan dengan sistem informasi pemerintahan.
3. Membantu mahasiswa memahami peran teknologi informasi dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintahan daerah.

B. Bagi Perguruan Tinggi

1. Memperkaya bahan ajar dalam mata kuliah terkait e-government, manajemen publik, dan teknologi informasi di sektor pemerintahan.
2. Mendorong kolaborasi penelitian antara perguruan tinggi dengan instansi pemerintah dalam mendukung transformasi digital.
3. Menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan praktis di bidang pengelolaan sistem informasi pemerintahan daerah, khususnya Sistem Informasi

Pemerintah Daerah (SIPD).

C. Bagi Instansi Terkait

1. Menyediakan wawasan baru untuk pengembangan kebijakan berbasis teknologi dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.
2. Memberikan panduan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Sumatera Selatan.
3. Mendorong penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.

D. Bagi Masyarakat

1. Meningkatkan aksesibilitas informasi publik melalui pemanfaatan SIPD secara maksimal oleh instansi pemerintah daerah.
2. Membantu masyarakat memahami manfaat *e-government* dalam peningkatan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R., & Aziz, R. (2022). Aziz, R. A., Hartono, S., & Puspaningtyas, A. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Berbasis E-Government: Studi tentang Pelayanan Akta Kelahiran melalui e-Lampid Kota Surabaya*. *Journal of Office Administration: Education and Practice*, 2(3), 211-220. <https://doi.org/10.26740/joaep.v2n3.p211-220>
- Aminudin, Suryani, B. B., Kambolong, M., & Nurzakinah, S. (2024). *Transformasi E-Government Dalam Persetujuan Bangunan Gedung: Melalui Sistem Informasi manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kota Kendari Sulawesi Tenggara*. *Journal Publicuho*, 7(2), 765-799. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.432>
- Andhayani, A., & Eltivia, N. (2022). *The Effect of Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) on Regional Financial Transparency in Local Governments*. 3. <https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2>
- Andriyan, Y., Rajab, A. M., Pamungkas, A. C., Muhamad, S., & Rahakratat, R. (2024). *Transformasi E-Government Menuju Good Governance di Pemerintah Kabupaten Sorong*. *Samakta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 24-35. <https://doi.org/10.61142/samakta.v1i2.127>
- Antoniades, A. C. (1990). *Poetics of Architecture: Theory of Design*. University of Michigan: Van Nostrand Reinhold.
- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (2025). *Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026*
- Creswell, J. W., & Cresswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. New York: SAGE Publications.
- Dewi, N., & Muhammad, Z. (2023). *Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala*. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 6(7), 887-894.
- Haryoko, Sapto. , B., & A. Fajar. (2020). *Analisis Data Penelitian Kuantitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. UNM.
- Heeks, R. (2006). *Implementing and Managing eGovernment: An International Text*. New York: SAGE Publications.
- Heriyanto, H. (2022). *Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik*. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066-075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Indrajit, R. E. (2006). *Electronic Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Aptikom.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- Irma, N., Ginting, B., & Leviza, J. (2023). *Penerapan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Binjai*. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(6). <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i6.168>
- Isnaeni, L. N., & Nurcahyanto, H. (2024). *Implementasi E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Temanggung*. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1(1), 439-455. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v1i1.48852>
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan*

- Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Governance, 1(2).*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/36315>
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 823 Tahun 2023 mengatur tentang Aplikasi Umum Bidang Pemerintahan Daerah.
- Kubicek, H., Cimander, R., & Scholl, H. J. (2011). *Organizational interoperability in e-government: lessons from 77 European good-practice cases*. Heidelberg: Springer.
- Laseau, P. (2001). *Graphic Thinking for Architects & Designers*. New York City: Wiley.
- Latifah, I. D. P., Budiati, A., & Riau, D. P. (2023). *Implementation of Regional Government Information Systems as Online Practices for Planning, Budgeting and Administration Processes*. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara, 15(2)*, 498-509. <https://doi.org/10.15575/jpan.v15i2.29057>
- Lestari, T., & Rianto, B. (2012). *Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*. Surabaya: Putra Media Nusantara (PMN).
- Libert, B., Beck, M., & Wind Jerry. (2016). *The Network Imperative: How to Survive and Grow in the Age of Digital Business Models*. Harvard University: Harvard Business Review Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. New York: SAGE Publications.
- Nasution, E. S. (2024). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kualitatif*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). *E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia (E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia)*. *Jurnal Iptekkom Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 22(1)*, 1-17. <https://doi.org/10.17933/iptekkom.22.1.2020.1-17>
- Nurlaila, N., Zuriatin, Z., & Nurhasanah, N. (2024). *Transformasi Digital Pelayanan Publik: Tantangan dan Prospek dalam Implementasi E-Government di Kabupaten Bima*. *Public Service and Governance Journal, 5(2)*, 21-37. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1468>
- Pasal 2 dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 mengatur tentang Satu Data Indonesia (SDI).
- Pasal 7 dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Pasal 391 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
- Pasal 395 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengatur tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 mengatur tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 mengatur

- tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Permatasari, A. W., Handoko, R., & Ibnu, A. (2025). *Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) Policy in Order to Improve Regional Government Accountability (Study: General Bureau of the Regional Secretariat of the East Java Provincial Government)*. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 8(1), 326-335. <https://doi.org/10.24815/jr.v8i1.43814>
- Rumimpunu, S. R., Tampi, J. R. E., & Londa, V. Y. (2021). *Implementation Of E-Government In Support Of Transparency And Public Disclosure (Case Study In Official Website Of Government Of Manado City)*. *Agri-SosioEkonomi Unsrat*, 17(2), 691-702. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2%20MDK.2021.35437>
- Rusadi, S. (2023). *Penerapan E-Government Melalui Aplikasi 'Sitanjak Makin Mantap' oleh Dinas Sosial*. *Jurnal Governansi*, 9(2), 95-102. <https://doi.org/10.30997/jgs.v9i2.7219>
- Salindeho, A. (2021). *The Role of Regional Government Information System (SIPD) on the Sub-District of Aertembaga's Financial Accountability*. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science*, 1(3), 150-153. <https://doi.org/10.55324/ijoms.v1i3.26>
- Sari, I. M., & Syafina, L. (2022). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(2), 220-227. <https://doi.org/10.24127/akuntansi.v3i2.3065>
- Scholl, H. J. (2010). *E-Government: Information, Technology, and Transformation*. New Yorks: M. E. Sharpe Incorporated.
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2024). *Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi*. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(4), 883-892. <https://doi.org/10.25126/jtiik2023107059>
- Sudirman, F. A., Saidin, Maswa, S., & Tri Susilawaty, F. (2025). *Implementation Of Regional Goverment Information System (Sipd) In Muna Barat Regency: An E-Government Analysis Using Nvivo*. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi*, 10(1), 97-107. <https://doi.org/10.52423/jikuho.v10i1.1490>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. ALBETA.
- Taufiqurokhman, T., Pathony, T., Damanik, F. H. S., Nurhakim, A., & Judijanto, L. (2023). *Transformasi E-Government: Mengevaluasi Dampak Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik*. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(2), 1796-1803. <https://doi.org/https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2390>
- Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Anggaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan*. *Jurnal Media Birokrasi*, 155-169.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Viona, J., & Khairiyah, K. (2022). *Transformasi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis E-Government (Studi Kasus: Kendala Pemerintah Kota Padang Dalam Penerapan e-Government)*. *Jurnal Suara Politik*, 1(1). <https://doi.org/10.31869/jsp.v1i1.3354>
- Wibowo, A. E. (2021). *Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah*. Cirebon: Penerbit Insania.